

Katalog : 3205005.3308

# **KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG 2017**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG**

# **KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG 2017**



# **Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2017**

ISBN : 978-602-71041-5-0  
Nomor Publikasi : 33080.1827  
Katalog : 3205005.3308

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : ix + 52 halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Desain Kover oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Penerbit:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Pencetak:**

TM Percetakan (Cetakan I: Juli 2018)

Percetakan Daerah Aneka Usaha (Cetakan II: November 2018)

**Sumber Ilustrasi:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin  
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## **SAMBUTAN**

### **KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN MAGELANG**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami menyambut gembira atas diterbitkannya buku “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2017”. Buku ini menyajikan data dan informasi perkembangan tingkat kemiskinan dan pola konsumsi penduduk di Kabupaten Magelang.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Strategi penanggulangan kemiskinan dan evaluasi kondisi kemiskinan selalu menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan data kemiskinan yang baik dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta yang telah terlibat dalam proses pengumpulan dan penyajian publikasi ini. Akhirnya kami berharap publikasi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, November 2018

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kepala Bappeda dan Litbangda



Drs. Sugiyono, M.Si.

## KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat, baik secara nasional maupun regional. Setiap tahun perkembangan penduduk miskin dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan menjadi pokok bahasan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Untuk kegiatan tersebut, aspek penting yang dibutuhkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menyajikan data dan informasi kemiskinan berdasarkan survei. Selain itu, dibahas pula tentang pola konsumsi penduduk menurut jenis konsumsinya sehingga dapat membantu memberi gambaran tentang pemerataan pendapatan dan pola konsumsi penduduk.

Publikasi Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2017 menjawab kebutuhan pemerintah daerah akan kebutuhan data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penentuan kebijakan. Publikasi ini merupakan hasil dari pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semoga publikasi ini bermanfaat

Magelang, Juli 2018  
Kepala Badan Pusat statistik  
Kabupaten Magelang



Ir. SRI WIYADI, MM

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
1 Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Sistematika Penyajian .....	4
2 Metodologi	6
2.1 Sumber Data .....	6
2.2 Konsep dan Definisi Secara Umum .....	6
2.3 Konsep dan Definisi Kemiskinan .....	7
2.4 Penyebab Kemiskinan .....	8
2.5 Pengukuran Kemiskinan .....	9
2.5.1 Penghitungan Garis Kemiskinan (GK) .....	9
2.5.2 Indikator Kemiskinan Konsumsi .....	14
2.5 Desain Pengukuran .....	14
2.6 Kalori .....	16
3 Analisis Kemiskinan .....	18
3.1 Kondisi Kemiskinan .....	18
3.1.1 Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2008-2017 .....	18
3.1.2 Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2008-2017 .....	20
3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2008-2017 .....	22
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin .....	25
3.2.1 Pendidikan .....	25
3.2.2 Ketenagakerjaan .....	28

	Halaman
3.2.3 Kesehatan .....	30
3.2.4 Fasilitas Perumahan .....	32
3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan .....	33
4 Pola Konsumsi Penduduk .....	40
4.1 Gambaran Umum Ekonomi Kabupaten Magelang .....	40
4.2 Rata-rata Pengeluaran Penduduk .....	41
4.3 Pola Konsumsi Penduduk .....	43
4.3.1 Pola Konsumsi Makanan .....	33
4.3.2 Pola Konsumsi Non Makanan .....	35
5 Penutup .....	49

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.1.	Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017 .....	20
Tabel 3.1.2.	Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017 .....	21
Tabel 3.1.3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan ( <i>Poverty Gap Index</i> , $P_1$ ) serta Tingkat Keparahan Kemiskinan ( <i>Poverty Severity Index</i> , $P_2$ ) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2017 .....	23
Tabel 3.3.1.	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin, Rata-rata Banyaknya Raskin yang Diterima dan Rata-rata Harga Raskin Perkg Tahun 2016-2017 .....	34
Tabel 3.3.2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2016-2017 .....	35
Tabel 3.3.3.	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kredit Usaha yang Diterima Setahun Terakhir Tahun 2016-2017 .....	36
Tabel 3.3.4.	Persentase Penduduk Miskin yang Bersekolah dan Mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2016-2017 ...	37
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 .....	41
Tabel 4.2.1.	Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk, Tahun 2017 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1.1      Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2008-2017 .....	19
Gambar 3.1.2.    Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017 .....	22
Gambar 3.1.3.    Tingkat Kedalaman Kemiskinan ( <i>Poverty Gap Index</i> , $P_1$ ) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan ( <i>Poverty Severity Index</i> , $P_2$ ) Kabupaten Magelang Tahun 2008 – 2017 .....	24
Gambar 3.2.1.1    Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016-2017 .....	26
Gambar 3.2.1.2.   Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun Tahun 2016-2017 .....	27
Gambar 3.2.1.3.   Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7-15 Tahun 2016-2017 .....	28
Gambar 3.2.2.1.    Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2016-2017 .....	29
Gambar 3.2.2.2.    Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Tahun 2016-2017 .....	30
Gambar 3.2.3.1.    Pemberian Imunisasi Balita Miskin Berdasarkan Jenis Imunisasi Tahun 2016-2017 .....	31
Gambar 3.2.3.2.    Persentase Perempuan Miskin Umur 15-49 Tahun yang Mengikuti Program KB dan Persentase Balita Miskin yang Mendapatkan Imunisasi Tahun 2016-2017 .....	32
Gambar 3.2.4      Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Tahun 2016-2017 .....	33
Gambar 3.3.1.      Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2016-2017 .....	38
Gambar 4.3.1.      Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, Tahun 2012-2017 .....	42
Gambar 4.3.2.      Komposisi Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran , Tahun 2017 .....	44

	Halaman
Gambar 4.3.3. Pola Konsumsi Makanan Menurut Penggunaan , Tahun 2017 .....	46
Gambar 4.3.4. Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Penggunaan, Tahun 2017 .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masalah kemiskinan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dari tahun ke tahun. Keberhasilan penyelenggaraan suatu pemerintahan salah satunya juga dilihat dari tingkat kemiskinan suatu daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Strategi penanggulangan kemiskinan dan evaluasi kondisi kemiskinan selalu menjadi prioritas bagi pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik harus merupakan data kemiskinan yang dapat dipercaya, sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, bisa digunakan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu angka kemiskinan baru dihitung secara nasional. Kemudian mulai Tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin mulai disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Baru pada Tahun 2002, BPS menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas. Pada awalnya data kemiskinan dihitung 3 tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Susenas Modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 tahun, mulai tahun 2011 sampai 2014 dilakukan penghitungan kemiskinan setiap tahun dengan pelaksanaan Susenas Modul Konsumsi triwulanan. Sejak tahun 2015 penghitungan angka kemiskinan didasarkan pada hasil Susenas Konsumsi Pengeluaran yang dilakukan setiap bulan Maret.

Arah dan tujuan pembangunan nasional mensyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat

berdasarkan dengan nilai kontribusi masing-masing. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk-

Berkaitan dengan hal-hal diatas dan untuk menjawab kebutuhan data perlu disusun publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016” yang memuat data dan informasi tentang kondisi kemiskinan dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang.

## **1.2. Tujuan**

Secara spesifik penerbitan publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2017” ini bertujuan memberikan data dan informasi tentang:

- i. perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2008-2017
- ii. perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang tahun 2008-2017
- iii. perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2008-2017.
- iv. karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017
- v. program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan Tahun 2016-2017
- vi. gambaran secara umum kondisi dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2017.
- vii. gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan berkaitan dengan kemiskinan dan pola konsumsi penduduknya.

## **1.3. Sistematika Penyajian**

Publikasi ini disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:  
Bab satu berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, lingkup pembahasan, sumber data dan sistematika penyajian.

Bab dua berisi metodologi yang berisi sumber data, konsep dan definisi, penghitungan kemiskinan dan teori yang dipakai dalam analisis kemiskinan.

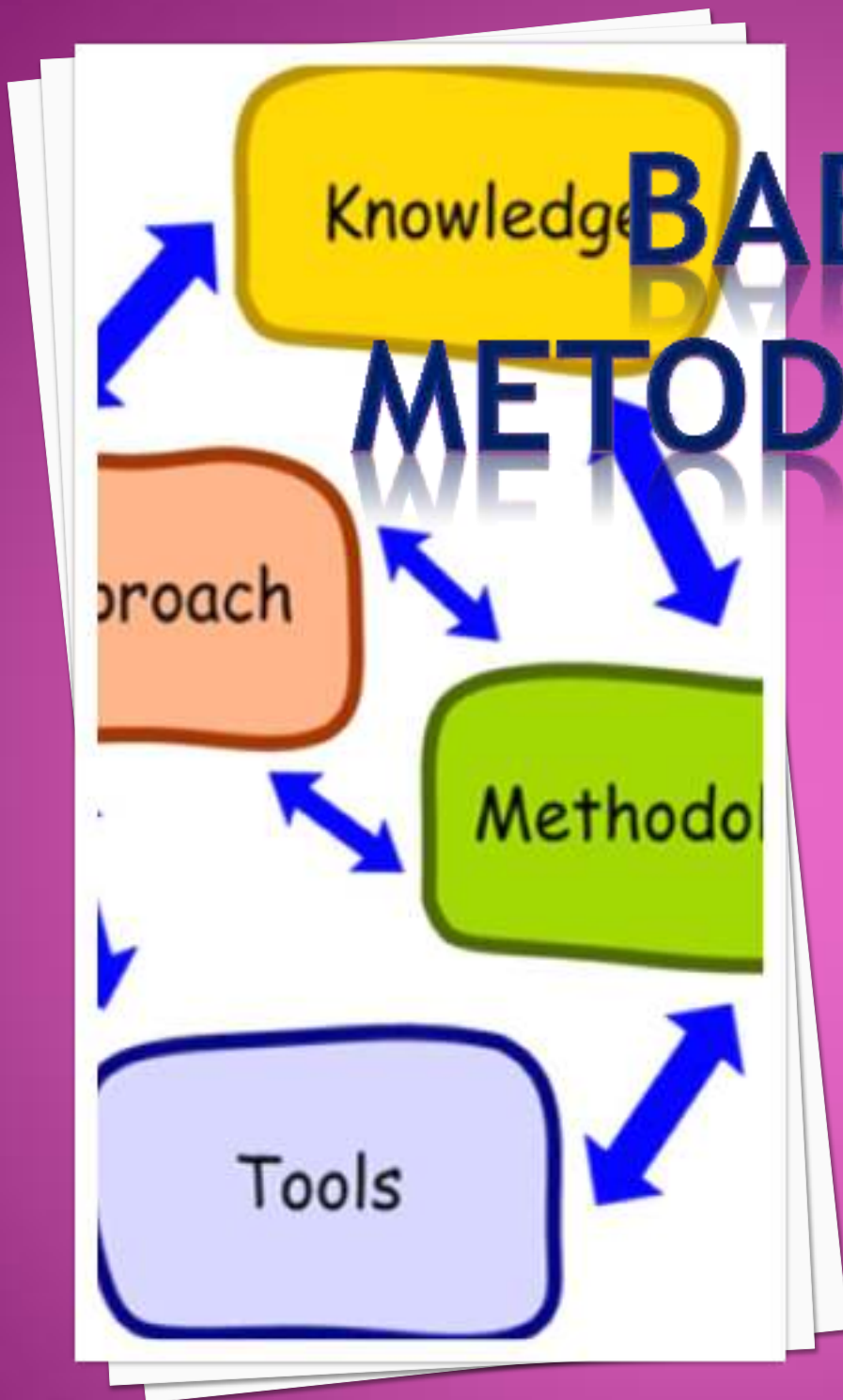
Bab tiga berisi tentang analisis kemiskinan yang berisi berbagai ukuran kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program bantuan pengentasan kemiskinan.

Bab empat berisi analisis pola konsumsi penduduk di Kabupaten Magelang.

Bab lima menyajikan masalah saran kebijakan yang berisi pentingnya data kemiskinan, strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dan pengaruh pola konsumsi penduduk.

## BAB II

# METODOLOGI



## **BAB 2**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Sumber Data**

Angka Kemiskinan dan Pola Konsumsi penduduk Tahun 2017 di Kabupaten Magelang dihitung berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017. Pengumpulan data rumah tangga diperoleh dari hasil wawancara langsung antara pencacah dan responden yang mewakili rumah tangga bersangkutan

#### **2.2. Konsep dan Definisi Secara Umum**

Konsep dan definisi yang digunakan dalam penulisan publikasi ini sesuai dengan konsep dan definisi yang digunakan pada Susenas 2017.

##### **Rumah Tangga**

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu.

##### **Anggota rumah tangga/ Penduduk**

Anggota Rumah Tangga (ART) / penduduk adalah orang yang biasanya tinggal dalam satu rumah tangga, baik yang berada didalam rumah tangga saat pencacahan maupun yang sementara sedang tidak ada. Orang yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan untuk menetap ditempat lain/pindah tidak termasuk ART. Dan orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap dianggap sebagai ART.

##### **Pengeluaran**

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, barang tahan lama, pajak

dan asuransi, dan keperluan pesta dan upacara). Konsumsi yang dimasukkan disini tidak memperhatikan asal barang atau jasa, jadi baik dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga semua dimasukkan dalam pencacahan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga yang digunakan rumah tangga lain atau diberikan kepada pihak lain tidak dimasukkan dalam pencacahan konsumsi rumah tangga.

### **Pendapatan**

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Dalam kenyataan dilapangan, informasi tentang pendapatan tidak seperti yang diharapkan karena banyak responden cenderung menyembunyikan infoemasi pendapatan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

## **2.3. Konsep dan Definisi Kemiskinan**

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain;

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan,

pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat- alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.
3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Pendekatan obyektif and subyektif, pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi–dimensi lain itu diperhitungkan.

## **2.4. Penyebab Kemiskinan**

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;

4. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
6. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

## 2.5. Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan pendekatan kebutuhan dasar atau dengan kata lain, konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan:

1. Menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2 100 Kalori per hari.
2. Garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (*purchasing power parity*) 1,25 dolar AS dan 2 dolar AS, sehingga dapat digunakan sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar atau dua dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan makro menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk. Konsep yang digunakan adalah dengan konsep moneter bahwa kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan dalam pendekatan pengeluaran rumah tangga (Jousairi Hasbullah). Metode yang dipakai BPS ini juga dipakai 50 persen negara berkembang dari 84 negara berkembang menurut inventarisasi dari United Nation Statistic Division.

### 2.5.1 Penghitungan Garis Kemiskinan (GK)

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Konsumsi. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

#### Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

#### Teknik penghitungan GKM:

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata Kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
3. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

$GKM_j$  = Garis Kemiskinan Makanan Daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100kilokalori).

$P_{jk}$  = Harga komoditi k di daerah j.

$Q_{jk}$  = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

$V_{jk}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya  $GKM_j$  tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata Kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

dimana :

$K_{jk}$  = Kalori dari komoditi k di daerah j

$\overline{HK}_j$  = Harga rata-rata Kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK_j} \times 2100$$

dimana :

$F_j$  = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau GKM.

J = daerah (perkotaan/perdesaan).

4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKP), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

dimana:

$NF_p$  = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNM<sub>p</sub>).

$V_i$  = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

$r_i$  = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD2004).

$I$  = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah  $p$ .

$P$  = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p},$$

$\%PM_p$  = % Penduduk miskin di provinsi  $p$ .

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin di provinsi  $p$ .

$P_p$  = Jumlah penduduk di provinsi  $p$ .

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p,$$

$PM_I$  = Penduduk miskin Indonesia.

$PM_p$  = Penduduk miskin provinsi  $p$ .

$N$  = Jumlah provinsi.

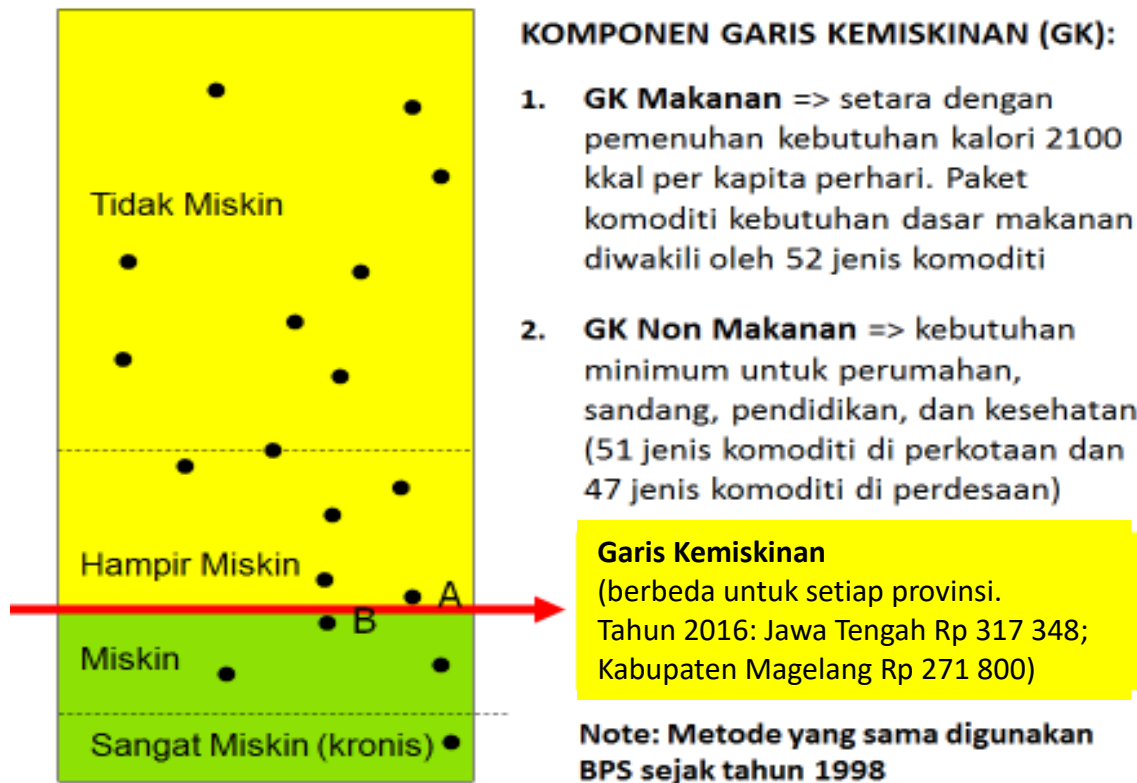
Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I},$$

$\%PM_I$  = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

$P_I$  = Jumlah penduduk Indonesia.



### 2.5.2 Indikator Kemiskinan Konsumsi

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. *Head Count Index (HCI- $P_0$ )*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- $P_1$* ) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index- $P_2$* ) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
4. Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

$\alpha$  = 0, 1, 2

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Jika  $\alpha=0$ , diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), jika  $\alpha=1$  diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- $P_1$ ) dan jika  $\alpha=2$  disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*- $P_2$ ).

## 2.6. Desain Pengukuran

Pengukuran tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat tersebut ternyata masih sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga dari hasil Susenas. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus diinterpretasikan secara hati-hati.

Melalui kegiatan Susenas, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

### A. Konsumsi makanan, meliputi :

1. Konsumsi padi-padian (Beras, jagung terigu, dll)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dll)

3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dll)
5. Konsumsi telur dan susu
6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dll)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi Minyak dan lemak
10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dll)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dll)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dll)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)
14. Konsumsi tembakau dan sirih.

**B. Konsumsi non makanan, meliputi :**

1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga (sewa/perkiraan sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa dll)
2. aneka barang dan jasa ( sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya.
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumah tangga, elektronik dll)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.
6. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan.

Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

## 2.7. Kalori

Kalori adalah satuan ukuran untuk energi. Satu kalori secara resmi didefinisikan sebagai jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 cm<sup>3</sup> air (atau 1 gram air) sebesar satu derajat Celcius. Untuk mengukur jumlah energi dalam makanan, ahli gizi umumnya menggunakan kilokalori (setara dengan 1000 kalori), dan label pengukuran mencantumkan sebagai “kkal” atau sebagai “Kalori” dengan “K” besar. Satu kkal setara dengan sekitar 4,184 kalori

# BAB III

## ANALISIS

### KEMISKINAN



Penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 41.03 persen dari jumlah penduduk miskin usia 15 tahun ke atas

## **BAB 3**

### **ANALISIS KEMISKINAN**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta profil rumah tangga miskin.

### **3.1. Kondisi Kemiskinan**

#### **3.1.1. Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2008-2017**

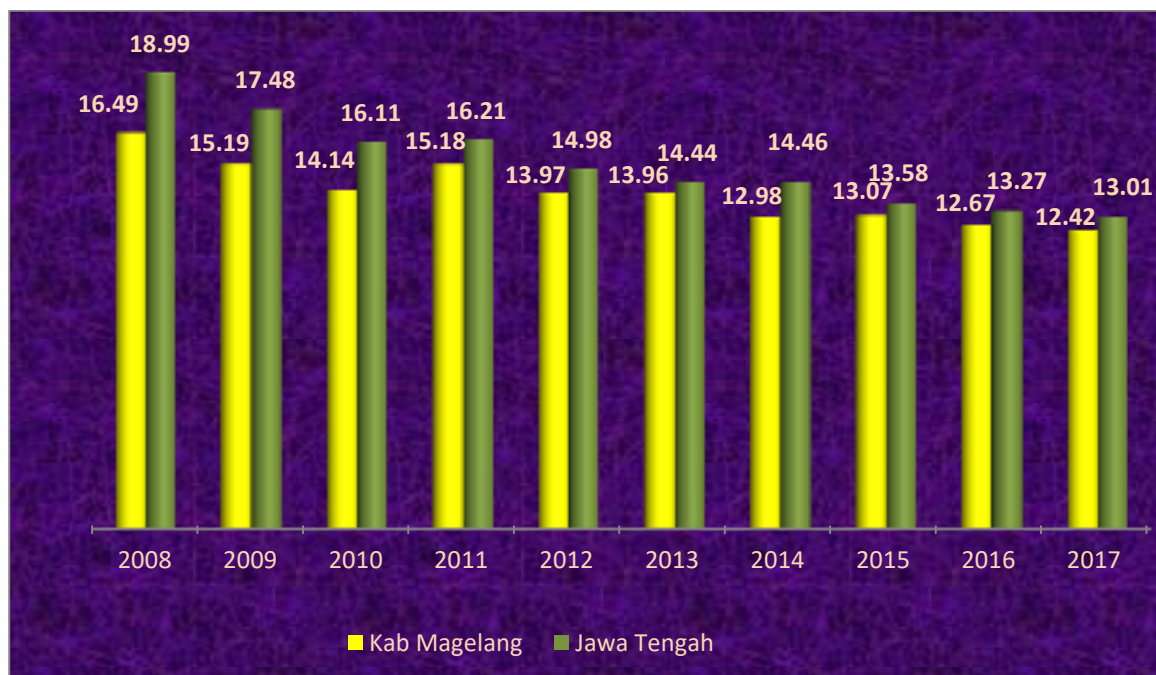
Persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang Tahun 2008-2017 menunjukkan nilai yang semakin menurun. Pada Tahun 2008 penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 16,49 persen atau sebanyak 190,8 ribu jiwa, turun menjadi 12,42 persen di Tahun 2017 atau menjadi sebanyak 157,15 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan dalam rentang waktu 9 tahun Pemerintah berhasil mengentaskan 37,65 ribu penduduk miskin. Namun jika dilihat per tahun terjadi fluktuasi di tiap tahunnya.

Gambar 3.1 dan Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode 2008-2017. Tingkat kemiskinan ini mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang relatif mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2010 dan 2011 dan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Persentase

penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang selama periode 2008 – 2017 terjadi pada tahun 2017 sebesar 12,42 persen, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 16,49 persen.

Pada level provinsi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah selama 2008—2017 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2008, Persentase penduduk miskin mencapai 18,99 persen, kemudian turun menjadi 13,01 persen pada tahun 2017. Namun berbeda dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Magelang, angka kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu menunjukkan nilai yang semakin menurun.

**Gambar 3.1.1.**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 – 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Secara khusus untuk Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang jumlahnya berkurang dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin Tahun 2016 sebanyak 158,87 ribu jiwa atau sebesar 12,67 persen, sedangkan di Tahun 2017 persentase penduduk miskinnya sedikit mengalami penurunan menjadi 12,42 persen atau sebanyak 157,15 ribu orang. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 2,16 persen atau sekitar sebanyak 3,5 ribu jiwa. Kondisi ini menunjukkan kondisi

yang bagus setelah sebelumnya penduduk miskin mengalami kenaikan dari 12,98 persen di Tahun 2014 menjadi 13,07 persen di Tahun 2015.

**Tabel 3.1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah**  
**Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 – 2017**

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2008	16,49	18,99	190,8	6 122,6
2	2009	15,19	17,48	176,5	5 655,4
3	2010	14,14	16,11	167,3	5 218,7
4	2011	15,18	16,21	179,6	5 256,0
5	2012	13,97	14,98	169,4	4 952,1
6	2013	13,96	14,44	171,0	4 811,3
7	2014	12,98	14,46	160,5	4 836,4
8	2015	13,07	13,58	162,4	4 577,0
9	2016	12,67	13,27	158,86	4 506,89
10	2017	12,42	13,01	157,15	4 450,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

### 3.1.2. Garis Kemiskinan Tahun 2008-2017

Garis kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode 2008 - 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 134 327,- perkapita perbulan yaitu dari Rp 146 910,- pada tahun 2008 menjadi Rp 281 237,- pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 11 194,- pada tiap tahunnya. Secara persentase meningkat rata-rata sebesar 7,62 persen pertahunnya.

Pada tahun 2007 di Kabupaten Magelang seseorang harus mampu mengeluarkan minimal Rp.126 638,- sebulan untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Jadi apabila dalam suatu rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka setiap

bulannya rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp.506 552,- untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Namun sepuluh tahun kemudian (2016), kenaikan harga barang-barang konsumsi telah menaikkan garis kemiskinan menjadi Rp. 271 800,- atau jika dalam rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp. 1 087 200,- setiap bulannya.

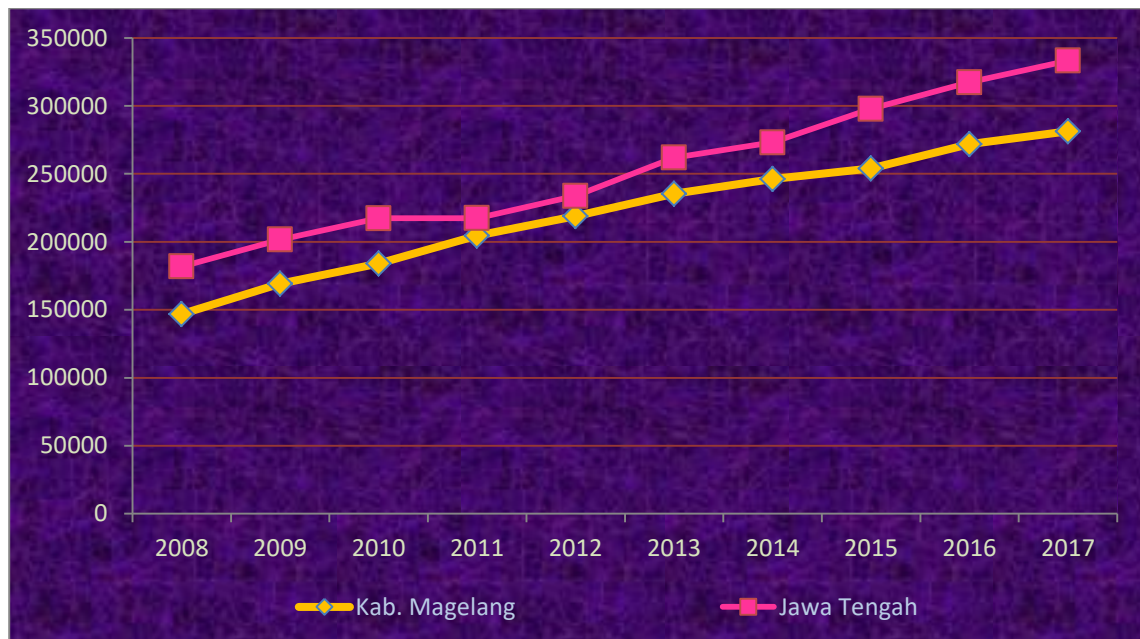
Garis kemiskinan Tahun 2017 sebesar Rp. 281 237,- atau naik sebesar 3,47 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 271 800,- di Tahun 2016. Kenaikan garis kemiskinan ini merupakan akibat dari kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk.

**Tabel 3.1.2.**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 – 2017**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2008	146 910	181 877
2	2009	169 158	201 651
3	2010	184 053	217 327
4	2011	204 430	217 440
5	2012	218 950	233 769
6	2013	235 430	261 881
7	2014	246 292	273 056
8	2015	253 866	297 851
9	2016	271 800	317 348
10	2017	281 237	333 224

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

**Gambar 3.1.2**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 – 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

### 3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan serta Tingkat Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator *Headcount Index/Head Count Ratio* ( $P_0$ ) atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin.

Oleh karena itu, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*,  $P_1$ ) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*,  $P_2$ ). Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Penurunan pada  $P_1$  mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan

antara standar hidup penduduk miskin. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P<sub>2</sub> mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

**Tabel 3.1.3.**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index, P<sub>1</sub>) serta Tingkat Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index, P<sub>2</sub>) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2017**

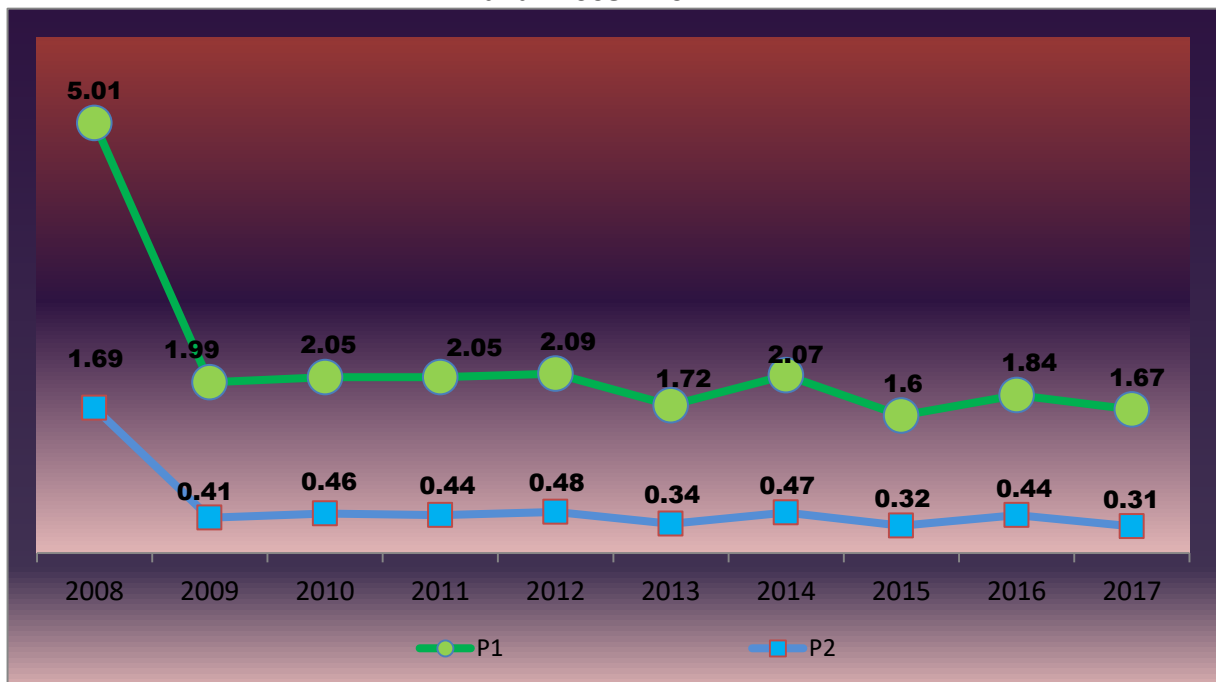
No	Tahun	P <sub>1</sub> (Kedalaman Penduduk Miskin)		P <sub>2</sub> (Keparahannya Penduduk Miskin)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2008	5,01	4,25	1,69	1,24
2	2009	1,99	2,89	0,41	0,87
3	2010	2,05	2,62	0,46	0,68
4	2011	2,05	2,58	0,44	0,66
5	2012	2,09	2,39	0,48	0,57
6	2013	1,72	2,37	0,34	0,59
7	2014	2,07	2,25	0,47	0,56
8	2015	1,60	2,44	0,32	0,65
9	2016	1,84	2,37	0,44	0,63
10	2017	1,67	2,21	0,31	0,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pada periode tahun 2008 – tahun 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) Kabupaten Magelang semakin menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 5,01 pada tahun 2008 menjadi 1,67 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang ditandai dengan rata-rata jarak antara

taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin rendah. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,01. Dan tahun-tahun setelahnya ada penurunan tingkat kedalaman kemiskinan yang signifikan di sekitar angka 2 yang menunjukkan semakin mendekatnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinannya. Pengaruh dari angka ini adalah semakin mudah mengentaskan kemiskinan karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah mendekati garis kemiskinannya.

**Gambar 3.1.3**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index,  $P_1$ ) dan**  
**Tingkat Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index,  $P_2$ ) Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2008 – 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indeks keparahan kemiskinan mempunyai kondisi yang sejalan dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan. Pada saat indeks kedalaman kemiskinan meningkat, maka indeks keparahan kemiskinan juga memperlihatkan nilai yang sama. Pada Tahun 2008 indeks keparahan kemiskinan 1,69 dan menjadi 0,31 di Tahun 2017. Indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi pada Tahun 2008 sebesar 1,69 dan terendah di Tahun 2017 yang sebesar 0,31. Pola perubahan indeks keparahan kemiskinan selaras dengan pola yang ditunjukkan oleh indeks kedalaman kemiskinan dimana pada Tahun 2008

merupakan nilai indeks tertinggi dan Tahun 2018 merupakan nilai terendah. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks maka kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Hal ini juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap program pengentasan kemiskinan karena akan mempermudah usaha pengentasan kemiskinan karena kondisi penduduk miskin semakin homogen

## **3.2. Karakteristik Penduduk Miskin**

### **3.2.1. Pendidikan**

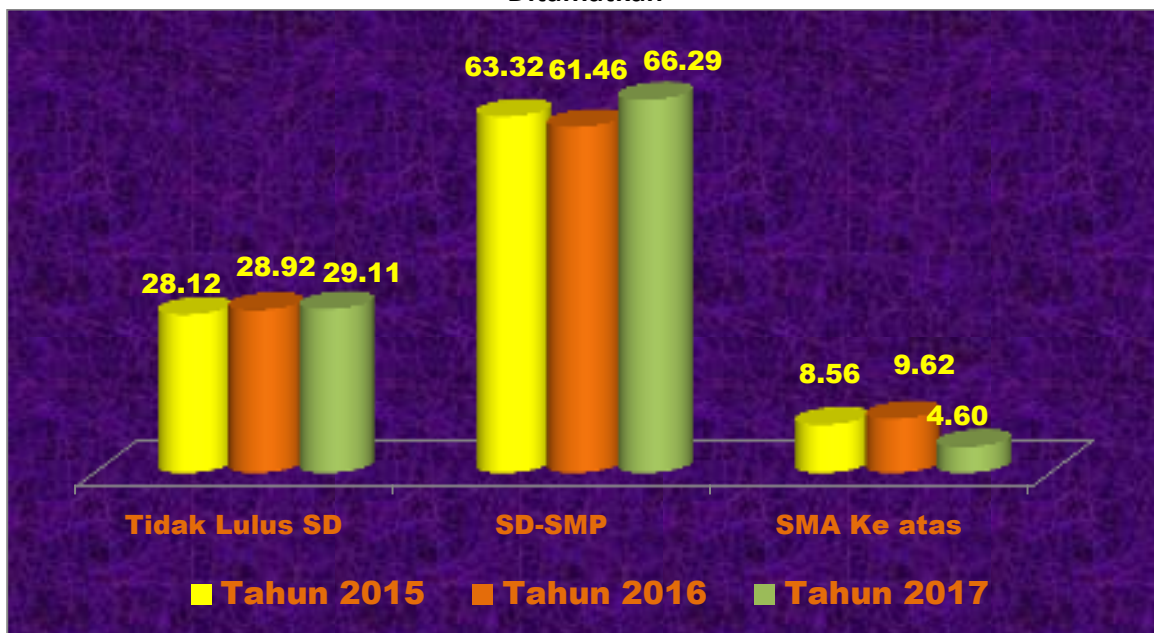
Pendidikan mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan penduduk sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan berperan dalam pembentukan karakter, pola pikir, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat, dan tingkat kepercayaan diri penduduk untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya berguna dalam persaingan dalam mencari pekerjaan namun juga berperan dalam ketangguhan penduduk dalam usaha untuk mencari alternatif penghidupan yang lebih baik. Bagi pemerintah, pembangunan dalam bidang pendidikan juga memberikan keuntungan antara lain untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi ketimpangan pendapatan dan akhirnya mengentaskan masalah kemiskinan.

Pada kondisi rumah tangga miskin, pendidikan tentu belum menjadi prioritas karena bagi mereka memenuhi kebutuhan primernya saja masih mengalami kesulitan. Dengan kondisi ini, kemiskinan akan menjadi lingkaran setan, dimana anak yang lahir dari keluarga miskin akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga kedepannya dengan pendidikan yang rendah hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang hasilnya tidak tetap dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu pola pikir orang tua dari anak usia sekolah yang berada dalam kondisi miskin juga belum begitu sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya, sehingga tidak bisa memberikan motivasi bagi anaknya dan semangat berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan bersekolah anaknya masih rendah.

Dalam masalah pendidikan, pemerintah memang sudah membuat berbagai program untuk mengentaskan masalah pendidikan. Program tersebut diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dengan program tersebut untuk tingkat pendidikan dasar negeri (setingkat SD dan SMP) bisa digratiskan dalam biaya bulanan. Bahkan mulai Tahun 2017 Bantuan Operasional Sekolah sudah bertambah sampai ke jenjang SMA. Selain itu ada program Indonesia Pintar maupun Bantuan Siswa Miskin. Diharapkan dengan berbagai program ini dapat digunakan sebagai solusi untuk peningkatan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat gambaran pendidikan antara lain tingkat pendidikan yang ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.

**Gambar 3.2 1.1.**  
**Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**



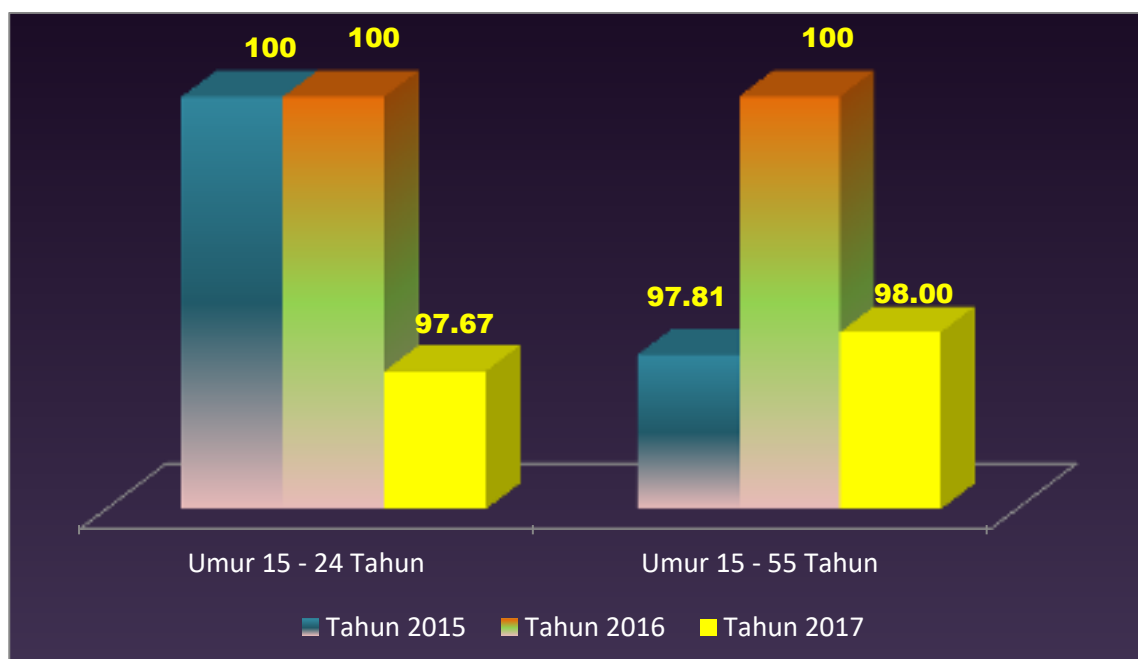
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambaran tingkat pendidikan penduduk miskin umur 15 tahun ke atas berdasarkan hasil Susenas Maret Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017 bisa dilihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas cenderung tamat SD dan SMP yaitu sebanyak 63,32 persen di Tahun 2015, 61,46 persen di Tahun

2016, dan 66,29 persen di Tahun 2017. Sedangkan untuk pendidikan tertinggi lulus SLTA ke atas pada Tahun 2016 sebesar 9,62 persen, lebih tinggi dibanding Tahun 2015 yang sebesar 8,56 persen. Namun di Tahun 2017 angka ini menunjukkan penurunan menjadi 4,60 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin untuk kelompok umur 15 – 24 Tahun dari hasil Susenas Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 100 persen, yang artinya semua penduduk miskin umur 15 – 24 tahun bisa membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Tahun 2017 angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun sebesar 97,67 persen, yang menunjukkan sebenarnya di masyarakat masih ada penduduk miskin yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya karena beberapa sebab. Sedangkan untuk kelompok umur 15 – 55 tahun, AMH Tahun 2015 sebesar 97,81 persen, Tahun 2016 sebesar 100 persen, dan Tahun 2017 sebesar 98,00 persen. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

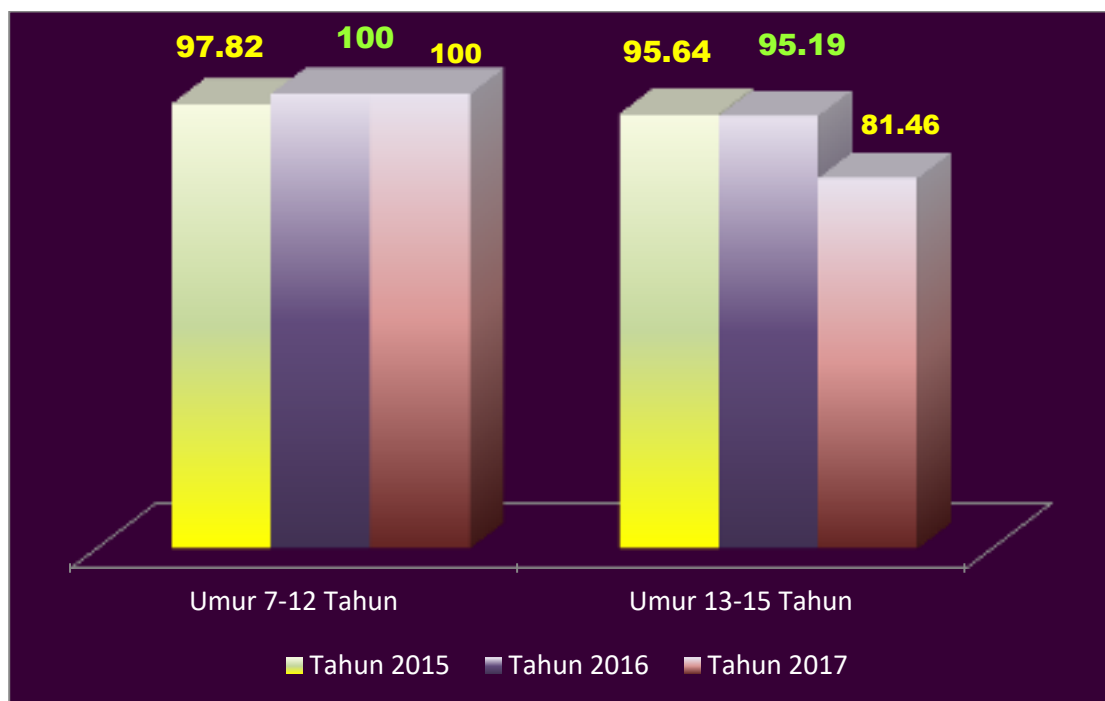
**Gambar 3.2.1.2.**  
**Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan penduduk adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan ini memasukkan pendidikan non formal yaitu kejar paket A, Paket B dan Paket C. Dari Hasil Susenas, APS penduduk miskin umur 7 – 12 tahun pada Tahun 2015 sebesar 97,82 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 97,82 persen penduduk miskin yang berumur 7 – 12 Tahun masih bersekolah. Pada Tahun 2016 dan 2017 APS umur 7-12 tahun lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 100 persen. Sedangkan untuk kelompok umur 13 – 15 tahun, nilai APS Tahun 2015 sebesar 95,64 persen, Tahun 2016 sebesar 95,19 persen, dan Tahun 2017 sebanyak 81,46 persen.

**Gambar 3.2.1.3.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7 – 15 Tahun**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

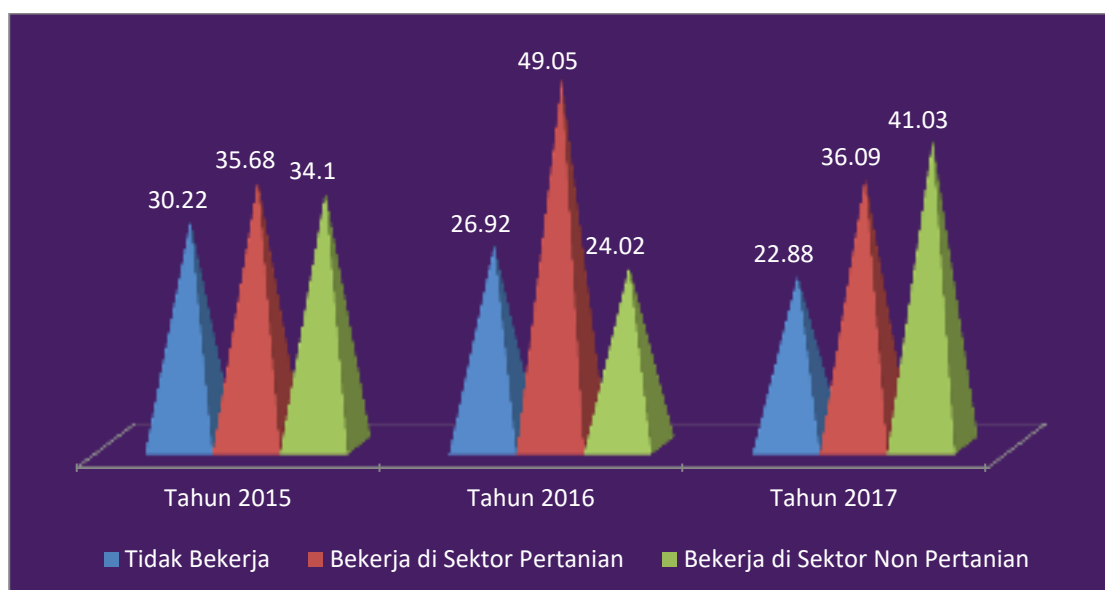
### 3.2.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan dalam masalah kemiskinan juga memegang peranan penting. Ketenagakerjaan berkaitan dengan sumber penghasilan rumah tangga yang sangat

mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penggolongan penduduk miskin dan tidak miskin suatu rumah tangga juga didasarkan pada tingkat kesejahteraan yang ditentukan oleh rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan. Besarnya pengeluaran rumah tangga tentunya juga dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diperoleh oleh semua anggotarumah tangga berdasarkan pekerjaan masing-masing.

Masalah ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penduduk yang bekerja. Bekerja disini adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Dari hasil pendataan Susenas, persentase penduduk miskin yang bekerja pada Tahun 2015 sebesar 69,78 persen, dimana dari jumlah tersebut sebesar 35,68 persen bekerja di sektor pertanian dan sisanya 34,10 persen bekerja di sektor non pertanian. Sedangkan pada Tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 73,08 persen, dimana 49,05 persen bekerja di sektor pertanian dan 24,02 persen bekerja di sektor non pertanian. Dan Tahun 2017 sebanyak 77,12 persen penduduk miskin bekerja dimana 36,09 bekerja di sektor pertanian dan 41,03 persen bekerja di sektor non pertanian.

**Gambar 3.2.2.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Keatas menurut Sektor Pekerjaan**

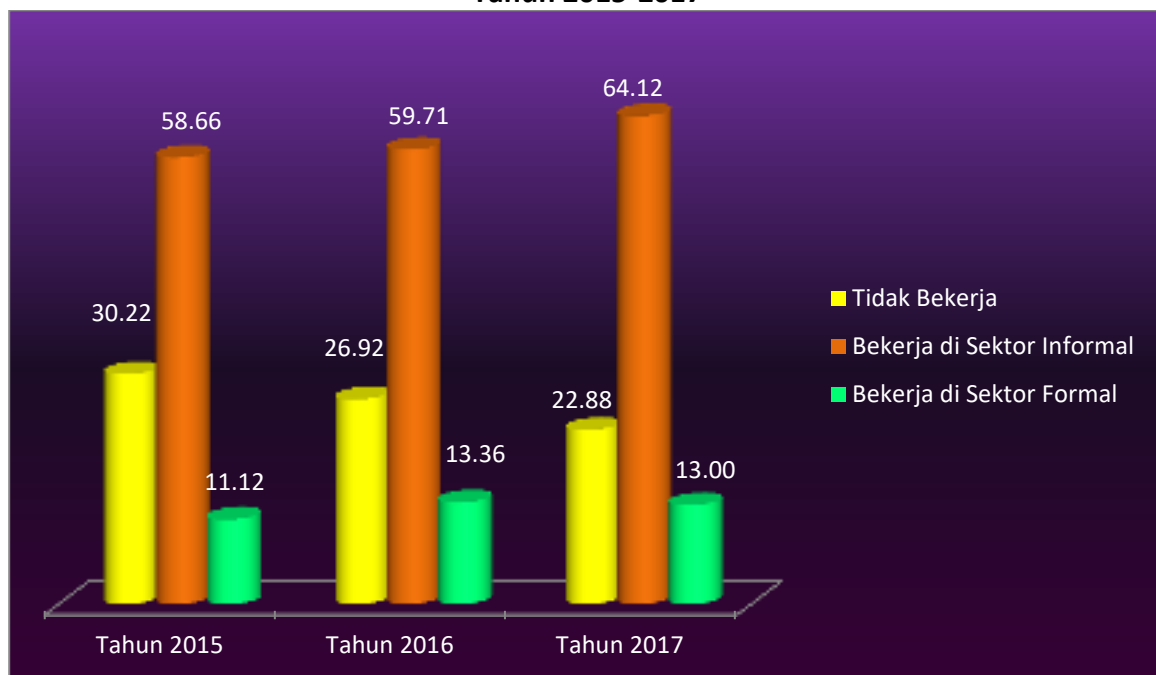


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Hasil dari Susenas juga menunjukkan terjadi pengurangan penduduk yang tidak bekerja dari tahun 2015 ke tahun 2016, dimana pada tahun 2015 penduduk usia kerja yang tidak bekerja sebesar 30,22 persen turun menjadi 26,92 persen di Tahun 2016, dan Tahun 2017 sebesar 22,88 persen. Penduduk yang tidak bekerja disini adalah penduduk miskin yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur dan bukan angkatan kerja, termasuk mereka yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga dan bersekolah.

Karakteristik penduduk miskin dilihat dari sisi ketenagakerjaan yang lain adalah status pekerjaan, yaitu penduduk yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang status kedudukan dalam pekerjaannya adalah bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

**Gambar 3.2.2.2**  
**Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan,**  
**Tahun 2015-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

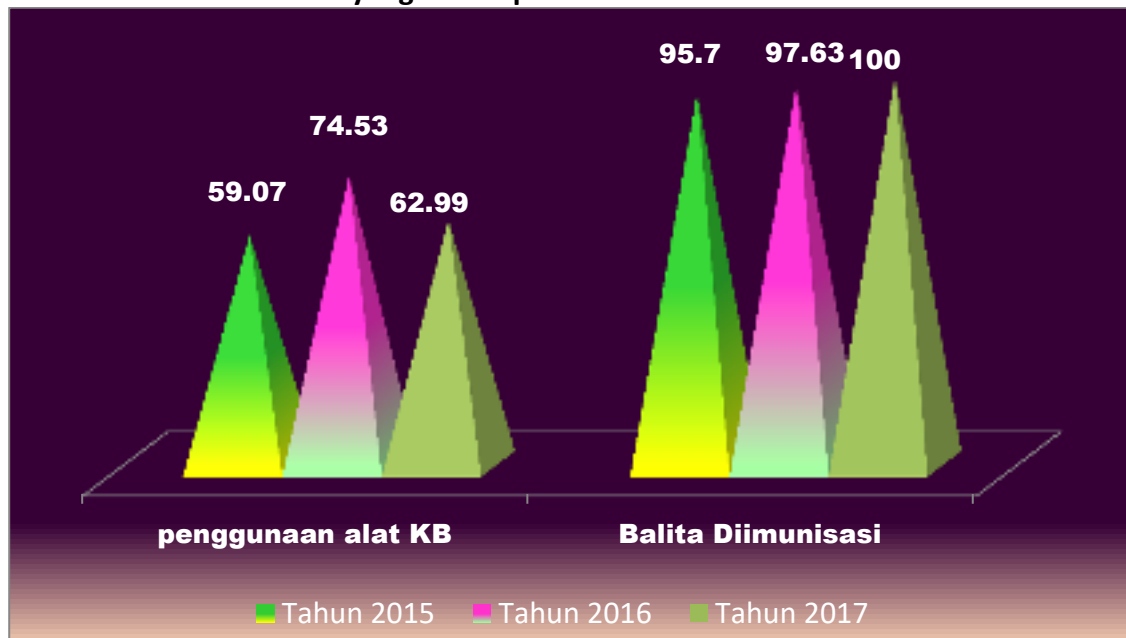
Sebagian besar penduduk miskin Kabupaten Magelang bekerja di sektor informal, baik

tahun 2015, tahun 2016, maupun tahun 2017. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebesar 58,66 persen, 59,71 persen di Tahun 2016, dan 64,12 persen di Tahun 2017 dari total penduduk miskin umur 15 tahun ke atas.

### 3.2.3. Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk merupakan aspek penting lainnya dalam masalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan derajat kesejahteraan rakyat selain dimensi pendidikan dan ketenagakerjaan. Penduduk yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik tentu akan mempunyai produktifitas yang semakin tinggi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang adalah program kesehatan untuk balita. Beberapa indikator kesehatan yang berkaitan dengan hal ini adalah pemberian imunisasi pada balita dan keikutsertaan dalam program KB.

**Gambar 3.2.3.2**  
**Persentase Perempuan Miskin Umur 15-49 Tahun yang mengikuti Program KB dan Balita Miskin yang mendapatkan Imunisasi Tahun 2015-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Program imunisasi merupakan langkah untuk mencegah penyakit menular, penyakit yang bisa menyebabkan kematian dan kecacatan. Kesadaran akan pentingnya

pemberian imunisasi untuk kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk imunisasi di berbagai fasilitas kesehatan. Tinggal bagaimana kesadaran penduduk untuk memanfaatkan dan menyadari bagaimana pentingnya pemberian imunisasi tersebut.

Pada Tahun 2016, perempuan berumur 15-49 tahun yang mengikuti program KB sebanyak 74,53 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 59,07 persen. Sedangkan di Tahun 2017 angka partisipasi terhadap program KB sebesar 62,99 persen. Untuk kegiatan imunisasi, sebagian besar rumah tangga miskin mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pemberian imunisasi untuk balita mereka. Hal ini juga dimungkinkan karena fasilitas yang diberikan pemerintah untuk semua penduduk untuk mendapatkan pelayanan imunisasi gratis yang bahkan sudah mencapai ke posyandu sebagai wilayah terkecil pelayanan kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2015 sebanyak 95,7 persen balita miskin mendapatkan imunisasi, Tahun 2016 sebesar 97,63 persen dan Tahun 2017 semua balita sudah mendapatkan imunisasi.

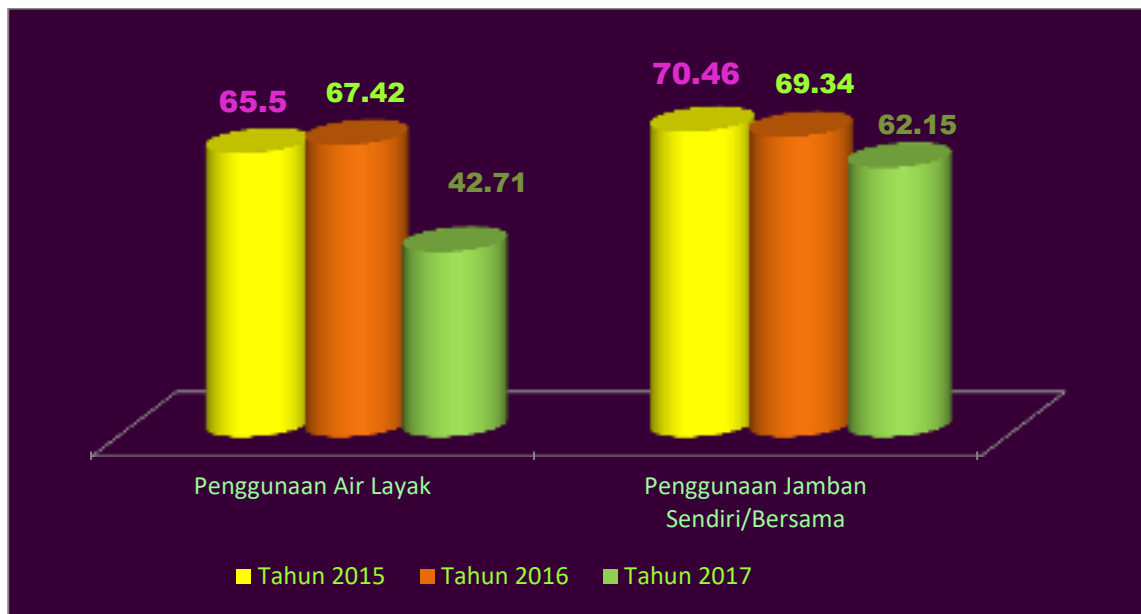
#### **3.2.4 Fasilitas Perumahan**

Fasilitas yang dimiliki oleh suatu tempat tinggal mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Tingkat kesehatan tempat tinggal juga mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang tinggal didalamnya. Ketersediaan air bersih terutama untuk fasilitas air minum dan fasilitas jamban yang dimiliki rumah tangga bisa dijadikan indikator untuk menunjukkan rumah sehat.

Ketersediaan fasilitas air bersih untuk sumber air minum penduduk miskin menunjukkan nilai yang cukup baik. Dari hasil pendataan Susenas Tahun 2016 dapat dilihat bahwa 67,42 persen penduduk miskin sudah menggunakan air layak untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nilai ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 65,50 persen. Sedangkan dari hasil Susenas Tahun 2017 rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi sebesar 42,71 persen. Rumah tangga pengguna air layak yang dimaksud disini adalah air minum yang sumbernya dari air terlindung yaitu ledeng meteran, ledeng eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran atau limbah lebih dari 10 meter atau air minum yang sumbernya dari air terlindung namun jarak ke penampungan kotoran/limbah kurang dari 10 m atau air tidak terlindung tapi sumber

untuk mandi/cuci dan lain-lain dari air terlindung.

**Gambar 3.2.4.**  
**Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/ Bersama Tahun 2015-2017**



\*Perbaikan Angka

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ketersediaan jamban menjadi salah satu indikator dalam melihat baik buruknya fasilitas perumahan. Selain ketersediaan jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga melihat ketersediaan jamban tersebut milik sendiri, jamban bersama, jamban umum, dan tidak tersedianya fasilitas jamban. Pada Tahun 2016 rumah tangga miskin yang sudah menggunakan jamban sendiri atau bersama adalah sebanyak 70,46 persen, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 69,34 persen. Sedangkan di Tahun 2017 rumah tangga miskin yang sudah menggunakan jamban sendiri atau bersama sebanyak 62,15 persen.

### **3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Langkah pemerintah tersebut diwujudkan dalam 4 paket

bantuan program untuk penduduk. Paket tersebut adalah:

1. Paket Bantuan Program I, berupa Bantuan dan Perlindungan Sosial yang ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk beras miskin (raskin), Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunah (BLT)
2. Paket Bantuan Program II, berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan perumahan.
3. Paket Bantuan Program III, yang berupa Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR)
4. Paket Bantuan Program IV, yang meliputi perumahan, transportasi, air bersih, listrik untuk rakyat miskin, nelayan miskin dan kelompok rentan di perkotaan.

Program raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sasaran penduduk yang miskin dan penduduk rentan miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk beras.

**Tabel 3.3.1**  
**Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin, Rata-rata Banyaknya Raskin yang diterima dan Rata-rata Harga Raskin Perkg, Tahun 2015-2017**

Komponen	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penerima Raskin (persen)	69,93	86,75	79,14
Rata-Rata Raskin yang Diterima (Kg)	4,94	5,07	4,94
Rata-rata Harga Raskin per Kg (Rp.)	2.207	2.199	2.359

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Persentase rumah tangga miskin yang pernah membeli raskin pada quartile 1 Tahun 2016 sebesar 86,75 persen, lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin yang menerima raskin Tahun 2015 yang sebanyak 69,93 persen. Rata-rata rumah tangga miskin tersebut membeli raskin 5,07 kg perbulan dengan harga Rp. 2.199,-. Di Tahun 2017 rumah tangga miskin yang menerima raskin/rastra sebanyak 79,14 persen dengan rata-rata berats yang diterima tiap rumah tangga adalah 4,94 kg dengan harga rata-rata Rp. 2.359,-.

Program pemerintah dalam bidang kesehatan adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta dalam program ini melingkupi seluruh penduduk Indonesia yang dibedakan dengan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) termasuk dalam hal ini penerima Jamkesmas dan Peserta Non Penerima Bantuan PBI.

**Tabel 3.3.2**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki,**  
**Tahun 2015-2017**

Komponen	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamkesmas/PBI/BPJS Kesehatan	41,6	35,6	52,8
Jamkesda	14,8	3,1	10,3
BPJS Kesehatan	3,3	15,5	1,7
BPJS Ketenagakerjaan	0,8	0,7	0,0
Askes/Asabri	1,0	0,3	0,0
Tanpa Jaminan Kesehatan	38,5	44,8	35,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Selain program dari pemerintah pusat, ada juga jaminan kesehatan yang berasal dari perusahaan untuk penduduk yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Sedangkan pemerintah daerah juga menyelenggarakan jaminan kesehatan tambahan untuk masyarakat miskin yang belum masuk dalam jaminan kesehatan untuk masyarakat

miskin program dari pemerintah pusat dalam bentuk Jamkesda. Dengan berbagai program jaminan kesehatan ini diharapkan dapat mengurangi beban penduduk miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya bisa menjadi jalan pengentasan kemiskinan. Dari data Susenas Tahun 2017, sebanyak 54,5 persen penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan berupa jamkesmas dan BPJS Kesehatan, dan 10,3 persen menerima jaminan kesehatan berupa Jamkesda. Sedangkan penduduk miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 35,2 persen.

Program penanggulangan kemiskinan yang lainnya adalah disediakannya kredit usaha yang bisa diakses oleh penduduk miskin. Kredit usaha bisa dijadikan salah satu cara dalam membangun perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Ada beberapa program kredit usaha yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun usaha perbankan, antara lain kredit usaha dari PNPM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Bersama (KUBE), dan Kredit Usaha Bank Selain KUR.

**Tabel 3.3.3**  
**Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kredit Usaha yang Diterima Setahun Terakhir, Tahun 2015-2016**

Kredit Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
PNPM	3,3	1,1	-
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0,9	1,0	0
Program Bank selain KUR	0,0	0,0	4,5
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0,9	0,0	0
Program Koperasi	0,7	2,7	0
Perorangan dan Lainnya	2,5	4,5	1,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan kredit usaha oleh rumah tangga miskin masih sangat kecil. Rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha pada

Tahun 2017 hanya sebesar 5,9 persen dari seluruh rumah tangga miskin dimana 4,5 persen dari program bank selain KUR dan 1,4 persen dari pinjaman perorangan.

Di bidang pendidikan, pemerintah sudah mengeluarkan program pendidikan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Namun pada kenyataannya di lapangan masih ada rumah tangga miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya, seperti kebutuhan buku, alat tulis, seragam, sepatu, biaya transportasi, dan lainnya yang tidak masuk dalam tanggungan BOS. Kondisi ini menjadi latar belakang pemerintah mengembangkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dari hasil Susenas Tahun 2016 rumah tangga miskin yang memiliki anak bersekolah di SD sebanyak 81 persennya mendapat BSM. Nilai ini lebih tinggi dibanding hasil pencacahan Susenas Tahun sebelumnya yang sebesar 66,4 persen. Untuk rumah tangga yang mempunyai anak Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat, sebanyak 39,5 persen mendapatkan BSM, lebih tinggi dibanding Tahun sebelumnya yang sebesar 33,6 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai anak sekolah di Sekolah Menengah baik umum maupun kejuruan yang mendapatkan BSM sebesar 8,6 persen.

**Tabel 3.3.4**  
**Persentase Penduduk Miskin yang Bersekolah dan Mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM), Tahun 2015-2016**

<b>Bantuan Siswa Miskin (BSM)</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
SD/Sederajat	66,4	81,0
SMP/Sederajat	33,6	39,5
Sekolah Menengah/Sederajat	0,0	8,6

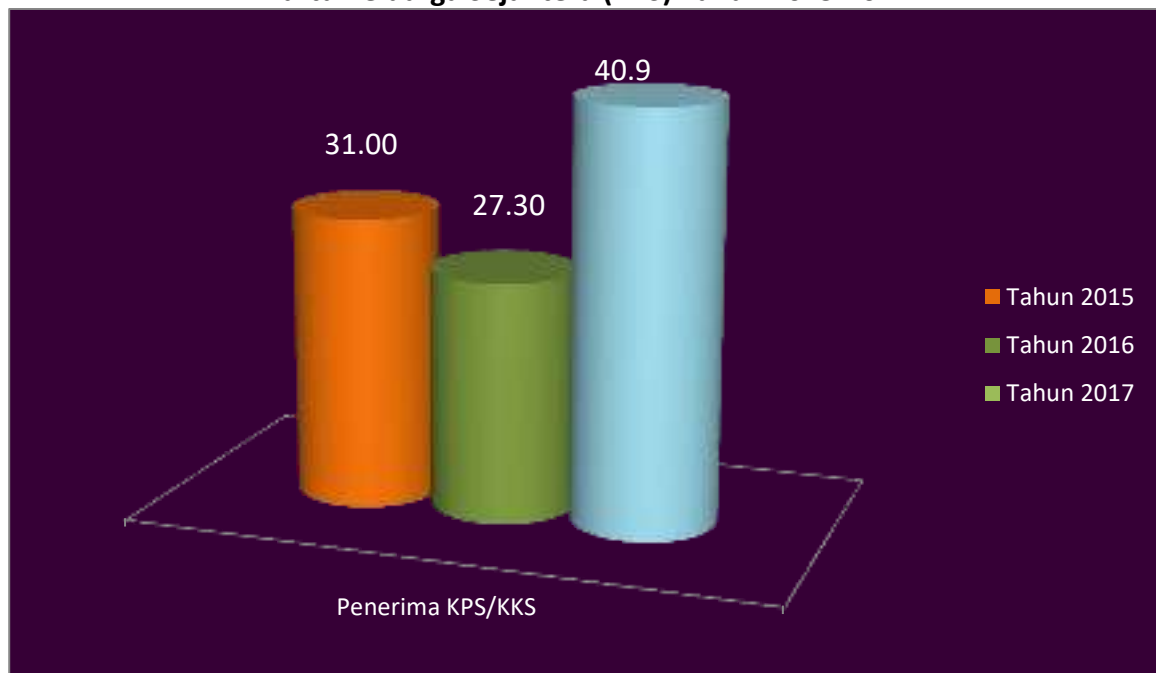
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pembaharuan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah. Pada Tahun 2017, program Bantuan Siswa Miskin sudah tidak diberikan lagi dan sebagai gantinya adalah dengan Program Indonesia Pintar. Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebanyak 18.5 persen dari penduduk miskin berumur 5 – 24 tahun.

Perhatian pemerintah kepada rumah tangga miskin diwujudkan dengan diterbitkannya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda rumah tangga miskin. Kartu ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Raskin, BSM, dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Pemerintah pusat mengeluarkan kartu ini kepada 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin yang merupakan 25 persen rumah tangga dengan status sosial ekonomi yang terendah.

Dari hasil pendataan Susenas Tahun 2017 rumah tangga miskin yang mendapatkan KPS atau KKS sebanyak 40,90 persen. Nilai ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

**Gambar 3.3.1**  
**Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2015-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

# BAB IV

## POLA KONSUMSI PENDUDUK



Makanan  
49.55 %

Non Makanan  
50.05 %

## **BAB 4**

### **POLA KONSUMSI PENDUDUK**

#### **4.1 Rata-rata Pengeluaran Penduduk**

Keadaan ekonomi rumah tangga di suatu daerah dapat diamati dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan konsumsi rumah tangga.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran penduduk didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran penduduk baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran penduduk dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari penduduk yang bersangkutan.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang,

pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Magelang per kapita sebulan hasil Susenas Maret 2017 sebesar Rp. 653 538,-. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2016 yang sebesar Rp. 519 126,- perkapita per bulan. Kenaikan ini dimungkinkan karena naiknya harga berbagai jenis kebutuhan penduduk karena pengaruh inflasi.

Tabel 4.1 menampilkan persentase penduduk, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan, dan persentase konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2017.

**Tabel 4.1.**  
**Persentase Penduduk dan Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran , Tahun 2017**

Kelompok Pengeluaran	% Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (RP)	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>&lt;150 000</b>	-	-	-	-
<b>150 000 – 199 999</b>	0,54	196 113	64,12	35,88
<b>200 000 – 299 999</b>	17,45	259 382	64,05	35,95
<b>300 000 – 499 999</b>	36,86	381 713	60,37	39,63
<b>500 000 – 749 999</b>	18,93	598 654	56,24	43,76
<b>750 000 – 999 999</b>	10,80	857 467	52,08	47,92
<b>1 000 000 – 1 499 999</b>	9,68	1 217 535	47,50	52,50
<b>&gt;1 500 000</b>	5,72	2 491 489	28,88	71,12
<b>Kab. Magelang 2017</b>		653 538	49,55	50,45
<b>2016</b>		619 126	47,62	52,38
<b>2015</b>		535 110	49,65	50,35
<b>2014</b>		466 678	54,07	45,93
<b>2013</b>		439 594	53,98	46,02

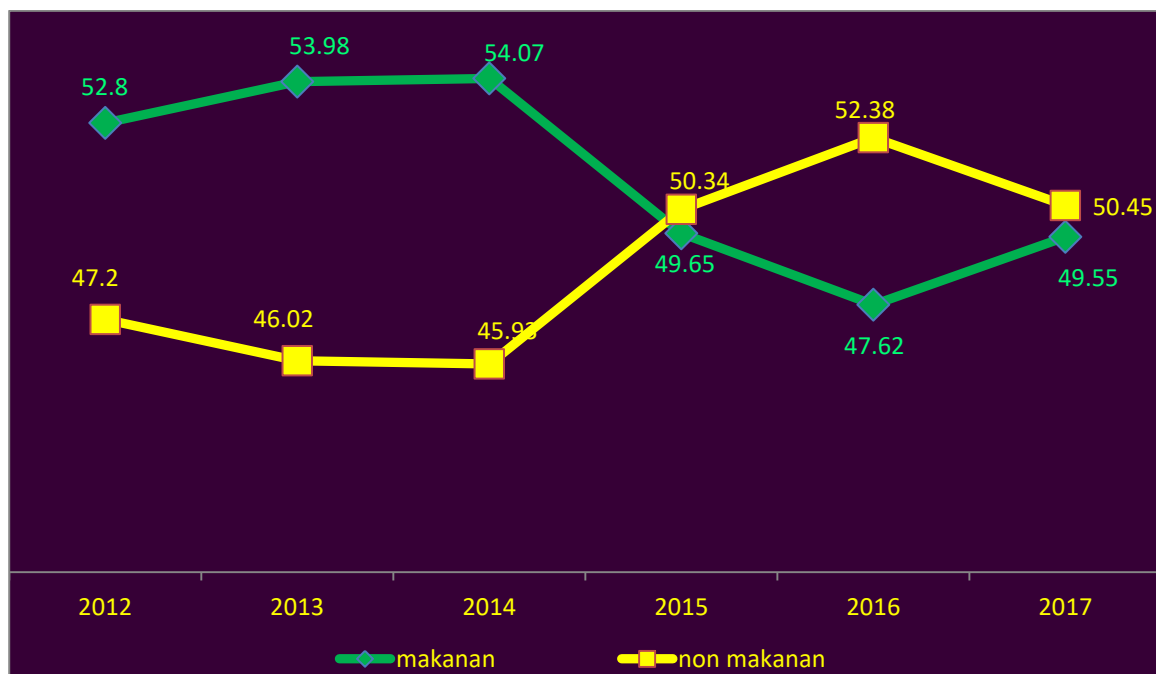
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dilihat dari kelompok pengeluaran penduduk, kelompok pengeluaran 300 000 – 499 999 rupiah mempunyai persentase tertinggi yaitu sebesar 36,86 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa ada 36,86 persen penduduk yang mempunyai pengeluaran perkapita sebulan antara 300 000 rupiah sampai 499 999 rupiah. Dalam urutan kedua sebesar 18,93 persen penduduk mempunyai pengeluaran di atara 500 000 rupiah dan 749 999 rupiah. Di urutan ketiga sebesar 17,45 persen penduduk mempunyai pengeluaran per kapita sebulan diantara 200 000 rupiah dan 299 999 rupiah. Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk (sebesar 73,24 persen) mempunyai pengeluaran per kapita sebulan antara 200 000 rupiah dan 749 999 rupiah.

## 4.2. Pola Konsumsi Penduduk

**Gambar 4.3.1**

**Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, 2012-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambaran perkembangan pergeseran pola konsumsi rumah tangga Kabupaten Magelang Tahun 2012 – 2017 tersaji dalam Gambar 4.2. Selanjutnya dengan komposisi distribusi pengeluaran tersebut mengindikasikan juga bahwa tuntutan kebutuhan untuk

memenuhi konsumsi makanan masih merupakan tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh penduduk Kabupaten Magelang. Komposisi pengeluaran seperti di atas tentunya akan terus bergeser dengan semakin membesarnya porsi pengeluaran pada kelompok non makanan, jika kesejahteraan penduduk Kabupaten Magelang kian hari kian membaik.

Disamping menggunakan tingkat pendapatan/pengeluaran pada tiap tahun, tingkat kesejahteraan rumahtangga juga dapat diukur dari perkembangan komposisi konsumsi penduduk, berupa konsumsi makanan dan non makanan dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kesejahteraan penduduk dikatakan semakin baik, apabila persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin kecil. Penduduk dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan penduduk tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan penduduk, makin kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran penduduk.

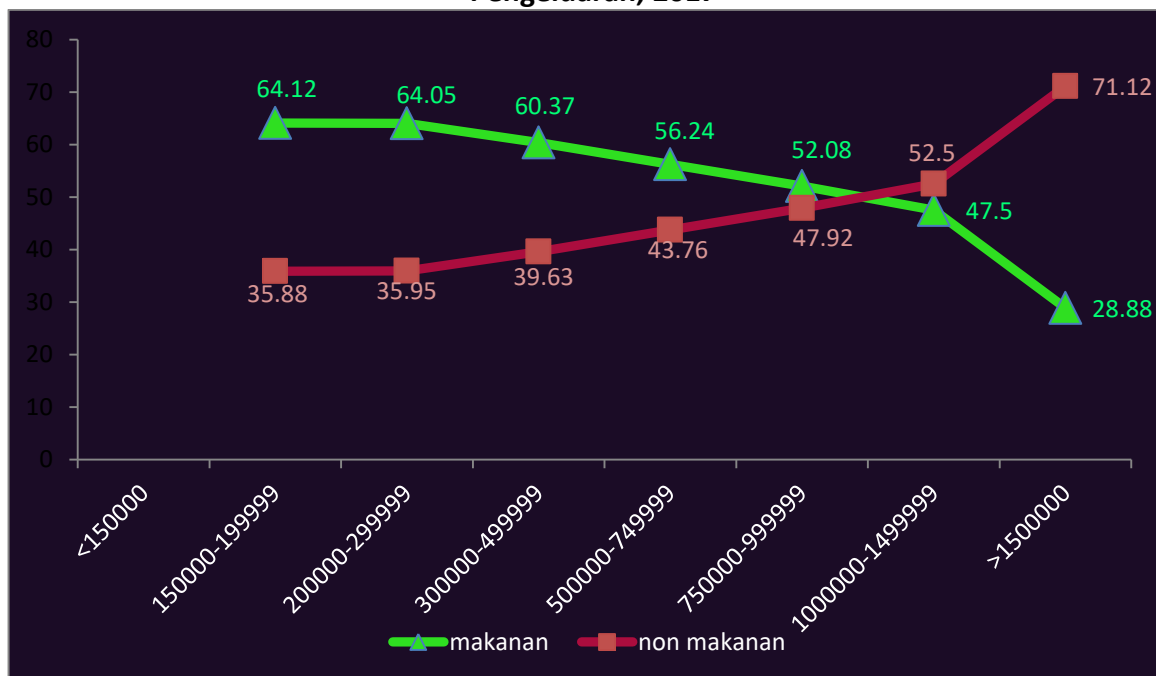
Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2012 – 2017 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan tahun 2012 ketahun 2017 bergeser dari 52,80 persen menjadi 49,55 persen dan konsumsi non makanan bergeser dari 47,20 persen menjadi 50,45 persen. Secara teoritis terlihat perubahan secara nyata komposisi pola konsumsi atau dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang mulai mengalami perubahan kesejahteraan.

Pada Tahun 2017 pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana konsumsi untuk non makanan sedikit lebih tinggi dibanding konsumsi makanan. Konsumsi untuk pengeluaran makanan pada Tahun 2017 sebesar 49,55 persen atau sebesar 323 828 rupiah, dan konsumsi non makanan sebesar 50,45 persen atau sebesar 329 710 rupiah. Pola pengeluaran penduduk selama 3 tahun terakhir bergeser dari yang sebelumnya sebagian besar untuk pengeluaran makanan menuju ke sebagian besar pengeluaran untuk non makanan. Pola pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisi konsumsi menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Dari angka tersebut dapat lebih menjelaskan bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Porsi pengeluaran masyarakat

dengan tingkat pendapatan tinggi terhadap kebutuhan non makanan seperti: perumahan, barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama (kendaraan, perhiasan dan sebagainya) biasanya lebih besar dibanding masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

**Gambar 4.3.2**

**Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan Kelompok Pengeluaran, 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Tingkat kesejahteraan penduduk yang berbanding lurus dengan pengurangan konsumsi makanan dan bertambahnya konsumsi non makanan bisa dilihat dari komposisi pengeluaran makanan dan non makanan per kelompok pengeluaran. Dilihat dari gambar 4.3.2. diatas, penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran di atas Rp. 1 500 000,- konsumsi makanannya rendah sekali, hanya mencapai 28,88 persen dari total konsumsi sedangkan konsumsi non makannnya mencapai 71,12 persen. Kelompok pengeluaran antara Rp. 1.000.000,- dan Rp. 1.499.999,- mempunyai pengeluaran makanan sebesar 47,50 persen dan non makanan sebesar 52,50 persen. Kondisi ini mendukung teori tentang tingkat kesejahteraan yang mempengaruhi pola konsumsi dimana untuk penduduk dengan tingkat pengeluaran tinggi mempunyai pengeluaran konsumsi yang lebih rendah dibanding pengeluaran non makanan. Untuk kelompok pengeluaran Rp.

750.000,- dan Rp. 999.999,- pengeluaran konsumsi makanan sebesar 52,08 persen dan konsumsi non makanan 47,92 persen. Kelompok pengeluaran dibawah itu pengeluaran makanannya masih lebih tinggi dibanding pengeluaran non makanan, dan bahkan di kelompok pengeluaran 150 000 – 199 999 pengeluaran makanan mencapai 64,12 persen, yang menunjukkan bahwa di kelompok ini pendapatan yang diperoleh baru bisa mencukupi kebutuhan makanan dan sedikit kebutuhan non makanan.

Tabel 4.2.1  
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk, Tahun 2017

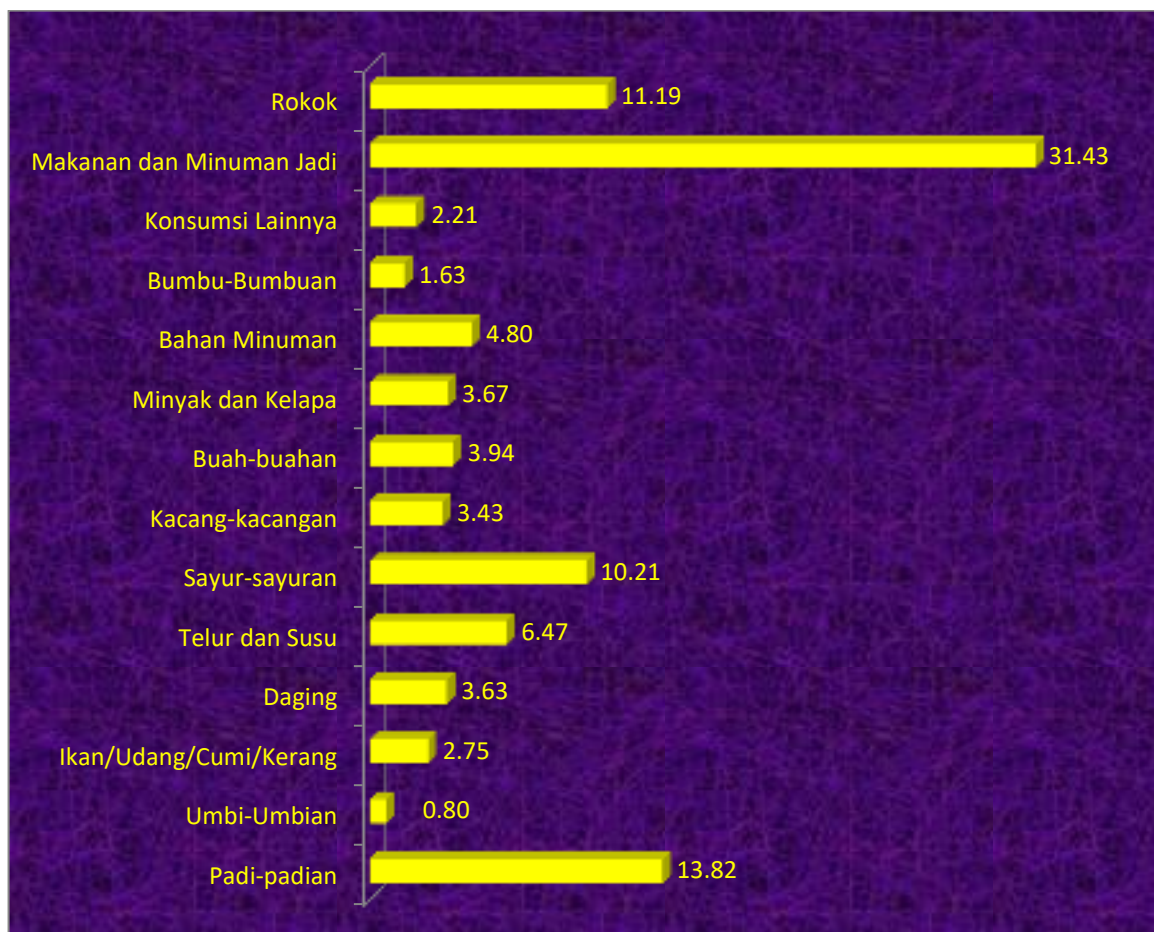
Jenis Pengeluaran			
Makanan	%	Non Makanan	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	13,82	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	43,94
Umbi-Umbian	0,80	Aneka barang dan Jasa	25,61
Ikan/UDang/Cumi/Kerang	2,75	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	5,43
Daging	3,63	Barang Tahan Lama	14,25
Telur dan Susu	6,47	Pajak, Pungutan dan Asuransi	7,07
Sayu-Sayuran	10,21	Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	3,70
Kacang-Kacangan	3,43		
Buah-Buahan	3,94		
Minyak dan Kelapa	3,67		
Bahan Minuman	4,80		
Bumbu-Bumbuan	1,63		
Konsumsi Lainnya	2,21		
Makanan dan Minuman Jadi	31,43		
Rokok	11,19		
Jumlah	100,00	Jumlah	100,00
Rata-rata Pengeluaran Tahun 2017	323 814	Rata-rata Pengeluaran Tahun 2017	329 724
(Rp/Perkapita/bulan) Tahun 2016	294 828	(Rp/Perkapita/bulan) Tahun 2016	324 298
Tahun 2015	265 706	Tahun 2015	269 404

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

#### 4.3.1 Pola Konsumsi Makanan

Pengeluaran kelompok makanan meliputi pengeluaran untuk bahan makanan yang berupa padi-padian, umbi, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dan lainnya, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, dan pengeluaran untuk rokok dan tembakau. Konsumsi terbesar kelompok makanan penduduk Kabupaten Magelang adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yang mencapai 31,43 persen. Setelah itu disusul oleh pengeluaran untuk padi-padian sebesar 13,82 persen, dan pengeluaran untuk rokok dan tembakau sebesar 11,19 persen. Pada urutan selanjutnya pengeluaran makanan adalah pengeluaran untuk sayur-sayuran dengan nilai 10,21 persen. Pengeluaran makanan lainnya mempunyai persentase dibawah 10 persen, dan jika melihat grafik 4.3.3, pengeluaran untuk konsumsi bahan protein masih termasuk kecil dengan persentase sekitar 3 persen.

**Gambar 4.3.3**  
**Pola Konsumsi Makanan Menurut Penggunaan, Tahun 2017**



#### 4.3.2 Pola Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran untuk konsumsi non makanan terdiri dari pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk pakaian dan perlengkapannya, pengeluaran untuk barang tahan lama, pengeluaran untuk pajak, pungutan dan asuransi, dan pengeluaran untuk keperluan pesta.

**Gambar 4.3.4**  
**Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Penggunaan, Tahun 2017**



Pengeluaran untuk konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 50,45 persen atau sebesar 329 710 rupiah dari total pengeluaran. Pengeluaran tersebut sebesar 43,94 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, kemudian 25,61 persen untuk memenuhi kebutuhan aneka barang dan jasa termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan didalamnya, dan 14,42 persen untuk memenuhi kebutuhan barang tahan lama. Sedangkan sisanya sebesar 6,18 persen untuk memenuhi kebutuhan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, 4,09 persen untuk

memenuhi kebutuhan pajak, pungutan, dan asuransi, dan 1,76 persen untuk memenuhi keperluan pesta dan upacara/kenduri. Dilihat dari pola pengeluaran tersebut sudah mencerminkan urutan kebutuhan penduduk dari kebutuhan yang paling penting.

# BAB V

## PENUTUP

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Tingkat kemiskinan atau jumlah dan persentase orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dan Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan pokok negara berkembang. Sejumlah pakar pembangunan telah menekankan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi namun juga melihat kualitas dari pertumbuhan. Penekanan baru ini menandai bahwa ada banyak hal lain yang penting selain dari angka tingkat pertumbuhan ekonomi.

Publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2017” memberi kesimpulan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2017 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya.
2. Kualitas penduduk miskin Kabupaten Magelang menunjukkan pengurangan selama periode analisis. Penurunan ini ditandai dengan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan (Indeks Kedalamam Kemiskinan/ $P_1$ ) semakin tinggi. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan.
3. Ketimpangan pendapatan atau penyebaran rata-rata pendapatan diantara penduduk miskin semakin terkendali, hal ini ditandai dengan angka indeks keparahan ( $P_2$ ) lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
4. Pelaksanaan bantuan program penanggulangan kemiskinan masih ada yang belum tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan beberapa program bantuan pengentasan kemiskinan yang tidak dinikmati oleh penduduk miskin.
5. Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran makanan di Tahun 2017 lebih kecil dibanding pengeluaran untuk konsumsi non makanannya, hal ini menunjukkan secara umum tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan.

6. Pengeluaran untuk konsumsi makanan didominasi oleh konsumsi makanan jadi, padi-padian dan rokok/tembakau. Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, pengeluaran untuk kebutuhan aneka barang dan jasa, dan pengeluaran untuk barang tahan lama.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511,

Telp (62-293) 788143, Faks (62-293) 788143,

E-Mail : [bps3308@bps.go.id](mailto:bps3308@bps.go.id) Homepage: <http://magelangkab.bps.go.id>

ISBN 970-482-2500-5 0 0 0



9 786027 104150